

THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, INFORMATION TECHNOLOGY USE, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) IMPLEMENTATION, AND INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS (EMPIRICAL STUDY ON WORK UNITS IN THE SCOPE OF KPPN D.I. YOGYAKARTA)

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA LINGKUP WILAYAH KPPN D.I. YOGYAKARTA)

¹⁾Silfiyana Wahyuningsih, ²⁾Maria Magdalena PD, ³⁾Untara

^{1) 2) 3)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana

¹⁾whsilfiyana@gmail.com, ²⁾mariastienus@gmail.com, ³⁾torobantul@gmail.com

Abstract

The high number of financial report fraud cases that occur in the government sector can weaken the level of public trust in government performance. Producing quality financial statements is an effort to increase government accountability and transparency to restore public trust. The quality of financial reports is influenced by several factors. This study aims to analyze the effect of human resources competency, the advantage of information technology, application of Government Accounting Standards (SAP), and Internal Control on the quality of financial reports. The population of this study is a work unit within the scope of the Yogyakarta KPPN area with a total sample of 76 employees. The data analysis technique used is SEM (Structural Equation Model) using SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that the use of information technology and internal control systems has a positive and significant relationship to the quality of financial reports. While the competence of human resources and the application of Government Accounting Standards (SAP) has a positive but not significant relationship to the quality of financial reports.

Keywords: *The Quality of Financial Reports, Human Resources Competency, Application of Government Accounting Standards (SAP), The Advantage of Information Technology Internal Control Systems.*

A. PENDAHULUAN

Kasus *fraud* yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Hal ini dapat melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Berdasarkan hasil survei *Report to The Nations* 2018 menyatakan bahwa *fraud* paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% diikuti dengan korupsi 38% dan *fraud* laporan keuangan sebesar 10% (ACFE, 2019). Sementara hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019 pada gambar 1 di bawah:

Gambar 1 Jenis Kasus Fraud 2019

No	Jenis Fraud	Jumlah Kasus	Persentase
1	Fraud Laporan Keuangan	22	9,2%
2	Korupsi	167	69,9%
3	Penyalahgunaan Aset/ Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20,9%

Sumber: ACFE Indonesia Tahun 2019

Menyatakan bahwa pada tahun *fraud* laporan keuangan menyebabkan kerugian sebesar 9,2% terhadap negara. Artinya ada penurunan terhadap *fraud* laporan keuangan sebesar 0,8%. Yang semula sebesar 10 % pada 2018 menjadi 9,2% pada 2019. Hal ini menjadi bukti bahwa kasus *fraud* laporan keuangan ini dapat dicegah. Menurut Amrizal (2004) Kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan yang bersifat *financial* atau *non financial* yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang dapat merugikan para *stakeholders* (Amrizal, 2004). Laporan keuangan memotret proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan. Laporan keuangan menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja sehingga laporan keuangan yang berkualitas dan disajikan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat memitigasi resiko terjadinya *fraud* laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai *good governance* (tata kelola yang baik). Dalam konteks pemerintahan *good governance* mengacu pada praktik-praktik yang memastikan integritas, efisiensi, keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya transparansi dalam penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memberikan transparansi terhadap keuangan lembaga. Artinya informasi keuangan yang relevan disajikan secara jelas dan akurat. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memahami kondisi keuangan lembaga dan membuat keputusan yang informasional secara tepat. Adanya transparansi dapat mengungkap praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan keuangan dapat terdeteksi lebih mudah. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi juga membantu dalam menjamin akuntabilitas lembaga. Laporan keuangan harus memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dan alokasi dana yang dimiliki lembaga. Keberadaan laporan keuangan yang akurat, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi apakah lembaga menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (PP Nomor 71 Tahun 2010)

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah terhadap publik yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Untuk menguji kualitasnya, laporan keuangan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan *review* tahunan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengeluarkan empat jenis opini, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*). (Sinulingga, et al., 2022). BPK telah mengeluarkan hasil audit LKPP Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2022. Hal ini merupakan peningkatan dan menunjukkan semakin baiknya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan hasil audit tahun-tahun sebelumnya yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2013 masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP ini sama dengan opini tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009 (BPK RI, 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi DIY selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2008 sampai dengan 2021 (BPKAD, 2022). Opini WTP atas LKPP dan LKPD menjadi kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan melalui komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagai lembaga publik Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN kemudian menaungi lembaga publik di bawahnya yang disebut dengan Satuan Kerja (Satker). Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran ini harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Akuntansi Pemerintah. Beragam faktor yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal dengan opini wajar tanpa pengecualian diantaranya yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pengendalian Internal.

Kompetensi sumber daya manusia akan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal, perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses penyusunan laporan keuangan pegawai. Penerapan SAP sebagai sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat mendukung pengelolaan laporan keuangan yang lebih baik. Pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyelewengan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka Peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah KPPN Yogyakarta)”**

B. KAJIAN LITERATUR

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan menunjukkan adanya kepentingan hubungan antara agen dan principal. Teori keagenan dapat diaplikasikan dalam organisasi sektor publik dan demokrasi modern (Dachi dkk., 2019). Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agen*), di mana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan principal dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Godfrey, 2017). Teori agensi berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberikan hak (*principal*) yaitu investor dan pihak yang berwenang

(agencies) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja yang sama disebut "*nexus of contract*".

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini Satuan Kerja Lingkup KPPN Yogyakarta (pemerintah) bertindak sebagai agen yang berkewajiban memberikan informasi kepada prinsipal yaitu masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan mengenai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang kemudian dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2. Laporan Keuangan

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan lain yang terkait, yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Werner R. Murhadi (2019) berpendapat laporan keuangan merupakan bahasa bisnis, di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Komponen laporan keuangan pokok berdasarkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2021 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci pokok bagi organisasi dalam menjalankan tujuannya (Aljabar, 2020). Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena memiliki peran sebagai subjek pelaksana kebijakan dan sebagai pelaksana kegiatan operasional organisasi atau perusahaan (Raden Yudhy P, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.

Kompetensi menurut *International Federation of Accountants* (2014:11) dalam IAESB: *Handbook of International Education Pronouncements* adalah kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seorang akuntan profesional harus memiliki pengetahuan profesional yang diperlukan, keterampilan profesional, dan nilai, etika, dan sikap profesional. Sependapat dengan Hutapea dan Thoha (2008) yang mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu :

- a. pengetahuan (*knowledge*)
pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya.
- b. keterampilan (*skill*)
keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal.
- c. sikap (*attitude*)
sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan pula pada bidang akuntansi, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses akuntansi. Keberadaan teknologi informasi mempermudah perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi, salah satu pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah yaitu terciptanya Sistem Aplikasi Terintegrasi dan Sistem SAKTI. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses terkait dengan pengelolaan APBN, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada bendahara umum negara dan kementerian/lembaga. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di semua tingkatan tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan tren saat ini menunjukkan bahwa TIK mempunyai peran yang semakin vital dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal.

Pemanfaatan teknologi dalam bidang akuntansi dapat membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses keuangan. Teknologi informasi yang terus berkembang akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mempersempit celah-celah terjadinya *fraud*.

5. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (PP No. 7 Tahun 2010). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6. Pengendalian Internal

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pengawasan intern. Berdasarkan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO yang diadaptasi Pemerintah Indonesia sebagai unsur-unsur pengendalian internal yang dimuat dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya
- b. Penilaian Risiko
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu identifikasi dan penilaian risiko dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pengendalian,
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- d. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- e. Pemantauan Pengendalian Internal
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

7. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Tujuan karakteristik yang menjadi prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang ditetapkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

8. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sukarno, et al., 2020 kompetensi menggambarkan karakteristik, pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan keterampilan seseorang. Hal ini yang membangun kepemahaman seseorang terhadap pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Delvina et al., 2021 secara empiris membuktikan bahwa kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian lain yaitu penelitian Astika dan Yasa (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Sedangkan Menurut penelitian Suwanda (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia di sub-bagian akuntansi atau keuangan dalam hal jumlah maupun kualifikasi kurang mencukupi. Dalam hal kuantitas, hanya terdapat beberapa karyawan akuntansi dalam satu unit. Dalam hal kualifikasi, mayoritas sumber daya manusia di bagian akuntansi atau administrasi keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Ha1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hamzah (2009) dalam Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2019) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Hasil Penelitian (Purnama Sari, et., al 2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Didukung oleh penelitian Tertia Ulina Rahma (2019) yang juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jefry Jef Gasperz (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPS di wilayah Maluku, disebabkan oleh belum semua BPS di Wilayah Maluku memiliki tenaga *operator computer* dan perangkat pendukung yang handal karena keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis serta perangkat lunak yang belum terintegrasi. Hambatan lainnya adalah kurangnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Ha2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

c. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin

bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi (Kuntadi, C., Juniarty Erika Magdalena Saragi, & Syasi Ikhlami Syafira, 2022). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tertia Ulma Rahma (2019) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah menunjukan pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian LKPD maka akan semakin baik kualitas LKPD yang dihasilkan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Valdo Maggri (2022) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Ha3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

d. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian yang dikaitkan dengan aktivitas manajemen perusahaan dan seluruh karyawan serta tidak bersifat acak dan tanggap terhadap kasus tertentu, melainkan berkesinambungan (Arista Diah, et., al, 2023). Hasil penelitian yang diperoleh (Anas Bin Malik. et., al, 2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Sertifikat Instalasi Prima (SIP). Didukung dengan penelitian Tertia Ulma Rahma (2019) dan (Purnama Sari, et., al, 2022) yang juga menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Ha4 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

C. METODE PENELITIAN

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja pada Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari studi pustaka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada setiap responden. Penyebaran kuisisioner dilakukan pada hari Selasa – Rabu, 20 – 21 Juni 2023 di Aula Lantai III GKN Yogyakarta, Jl.

Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta. Pada saat kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sakti Modul Administrasi dan Modul Bendahara, Refreshment Cash Management, Dan Sosialisasi Anti Korupsi yang dihadiri 1 (satu) perwakilan pegawai bidang keuangan masing-masing satuan kerja yang diundang.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah satuan kerja pada lingkup wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta sebanyak 275 satuan kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena sampel yang digunakan memiliki kriteria tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga tidak semua sampel dapat memenuhi kriteria. Sampel yang akan diolah adalah sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pegawai pada satuan kerja yang terdaftar dalam lingkup wilayah KPPN Yogyakarta
- b. Satuan kerja aktif melakukan pelaporan keuangan di KPPN Yogyakarta
- c. Pegawai bidang keuangan/anggaran

Jumlah minimum sampel yang diperlukan pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan *margin of error* atau kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir sebesar 10 % (0,1). Menghasilkan jumlah sampel minimum sebesar 73,3 sampel, maka sesuai dengan jumlah sampel yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 76 sampel yaitu sebanyak 27,64% dari total populasi sebanyak 275 responden.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen diukur menggunakan nilai *loading factor* atau *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator dikatakan layak jika nilai *loading factor* atau *outer loading* lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) memenuhi syarat bila di atas 0,5. Berikut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini hasil dari nilai *loading factor* atau *outer loading* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE):

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Konvergen

	Item	Outer Loading	AVE	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	X1.1	0.827	0,740	Valid
	X1.2	0.833		Valid
	X1.3	0.858		Valid
	X1.4	0.875		Valid
	X1.5	0.794		Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.1	0.825	0,690	Valid
	X2.2	0.872		Valid
	X2.3	0.825		Valid
	X2.4	0.883		Valid
	X2.5	0.864		Valid

	<i>Item</i>	<i>Outer Loading</i>	<i>AVE</i>	<i>Keterangan</i>
	X2.6	0.723		Valid
	X2.7	0.815		Valid
Penerapan SAP	X3.1	0.731	0,767	Valid
	X3.10	0.863		Valid
	X3.11	0.894		Valid
	X3.12	0.886		Valid
	X3.2	0.855		Valid
	X3.3	0.871		Valid
	X3.4	0.876		Valid
	X3.5	0.855		Valid
	X3.6	0.874		Valid
	X3.7	0.888		Valid
	X3.8	0.951		Valid
	X3.9	0.950		Valid
Pengendalian Internal	X4.1	0.851	0.736	Valid
	X4.10	0.850		Valid
	X4.2	0.814		Valid
	X4.3	0.889		Valid
	X4.4	0.860		Valid
	X4.5	0.912		Valid
	X4.6	0.929		Valid
	X4.7	0.744		Valid
	X4.8	0.852		Valid
	X4.9	0.863		Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y.1	0.854	0,793	Valid
	Y.2	0.913		Valid
	Y.3	0.893		Valid
	Y.4	0.907		Valid
	Y.5	0.895		Valid
	Y.6	0.861		Valid

Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

b. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Paramater pengujian ini dengan melihat nilai *Cross Loading* dan nilai *Fornell-Larcker Criterion*. Berdasarkan nilai *cross loading* dianggap valid jika lebih besar dari 0.7. Nilai *Fornell-Larcker Criterion* dianggap valid jika memiliki korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel yang berbeda. Nilai *fornell-larcker criterion* dan nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 dibawah ini :

Tabel 3 Nilai Fornell – Larcker Criterion

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	0.860				
X2	0.697	0.831			
X3	0.759	0.664	0.876		
X4	0.690	0.514	0.652	0.858	
Y	0.717	0.724	0.714	0.771	0.890

Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

Tabel 4 Cross Loading

	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.824	0.657	0.611	0.614	0.628
X1.2	0.861	0.544	0.641	0.571	0.597
X1.3	0.902	0.537	0.730	0.660	0.657
X1.4	0.905	0.677	0.628	0.555	0.573
X1.5	0.805	0.587	0.642	0.555	0.615
X2.1	0.559	0.825	0.631	0.411	0.620
X2.2	0.641	0.872	0.673	0.500	0.672
X2.3	0.551	0.825	0.590	0.443	0.550
X2.4	0.605	0.882	0.499	0.407	0.562
X2.5	0.659	0.863	0.527	0.460	0.616
X2.6	0.471	0.724	0.382	0.377	0.560
X2.7	0.553	0.815	0.530	0.378	0.609
X3.1	0.744	0.642	0.731	0.592	0.618
X3.10	0.635	0.535	0.863	0.619	0.630
X3.11	0.653	0.511	0.894	0.620	0.639
X3.12	0.670	0.537	0.886	0.596	0.665
X3.2	0.619	0.556	0.855	0.564	0.624
X3.3	0.660	0.468	0.872	0.587	0.559

	X1	X2	X3	X4	Y
X3.4	0.602	0.532	0.876	0.466	0.548
X3.5	0.701	0.716	0.854	0.533	0.660
X3.6	0.612	0.528	0.874	0.563	0.592
X3.7	0.676	0.671	0.888	0.515	0.629
X3.8	0.681	0.599	0.951	0.611	0.653
X3.9	0.700	0.648	0.950	0.571	0.652
X4.1	0.613	0.519	0.621	0.852	0.738
X4.10	0.569	0.368	0.534	0.849	0.610
X4.2	0.585	0.527	0.572	0.815	0.600
X4.3	0.568	0.404	0.559	0.889	0.606
X4.4	0.509	0.370	0.521	0.861	0.613
X4.5	0.716	0.525	0.614	0.912	0.727
X4.6	0.653	0.447	0.607	0.929	0.765
X4.7	0.617	0.406	0.577	0.742	0.582
X4.8	0.535	0.434	0.526	0.852	0.652
X4.9	0.534	0.388	0.457	0.863	0.673
Y.1	0.552	0.623	0.570	0.645	0.853
Y.2	0.635	0.662	0.644	0.726	0.919
Y.3	0.674	0.611	0.646	0.736	0.888
Y.4	0.713	0.675	0.698	0.737	0.906
Y.5	0.647	0.673	0.619	0.632	0.906
Y.6	0.597	0.619	0.630	0.633	0.869

Sumber : Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

c. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menggunakan parameter *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Konstruk dapat dikatakan reliabel atau andal jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0.7 (Ghozali dan Latan, 2015). Hasil output untuk nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 Cronbach's Alpha Dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
X1	0.912	0.934	Reliabel
X2	0.925	0.940	Reliabel
X3	0.972	0.975	Reliabel

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
X4	0.960	0.965	Reliabel
Y	0.948	0.958	Reliabel

Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

2. Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

a. Uji R-Square

R Square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998) dalam Sarwono (2015 : 30) menjelaskan “kriteria batasan nilai *R square* ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 sebagai substantial; 0,33 sebagai moderat dan 0,19 sebagai lemah”. Kegunaan *R – Square* bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel laten independent terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh substantif.

Tabel 6 *R-Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0.750	0.736

Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

b. Uji Q-Square

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Nilai *Q – Square* dapat dikatakan reliabel, jika terdapat keterkaitan secara prediktif dengan variabel lainnya dan memiliki nilai diatas 0 dengan tingkat relevansi $Q^2 \leq 0.02$ (kecil), $Q^2 \leq 0.15$ (sedang) dan $Q^2 \geq 0.35$ (besar). Hasil nilai Q^2 dapat dilihat dari table 7 dibawah ini :

Tabel 7 *Predictive Relevance*

Variabel	Q^2 (=1-SSE/SSO)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	0.581	<i>Predictive relevance</i> besar/kuat

Sumber : Hasil Output SmartPLS, 2023

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa hipotesis penelitian diterima atau ditolak dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, *t-statistic* dan *p-values*. Pengujian hipotesis ini menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0 dengan melihat nilai – nilai dari hasil bootstrapping. Untuk mengetahui hubungan struktural antar variabel laten adalah dengan membandingkan angka *p-value* dengan alpha sebesar 0.05 (5%) atau *t – statistik* sebesar (>1.96). Berikut dibawah ini hasil model penelitian yang digambarkan seperti pada gambar dan untuk menilai *signifkansi* model prediksi dalam pengujian model struktural dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antar variabel independen ke variabel dependen dalam tabel 8 :

Tabel 8 path coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>	<i>Keterangan</i>
X1 -> Y	0.028	0.020	0.118	0.235	0.814	Ditolak
X2 -> Y	0.369	0.368	0.097	3.794	0.000	Diterima
X3 -> Y	0.141	0.153	0.119	1.189	0.235	Ditolak
X4 -> Y	0.470	0.468	0.099	4.727	0.000	Diterima

Sumber : Hasil Output SmartPLS (2023)

4. Pembahasan Hasil Pengujian

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai t sebesar 0,235 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960) dan p-value sebesar 0,814 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang positif, namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis pertama, maka hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan yang baik dan andal tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi sumber daya manusia saja, karena banyak faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dilihat dari sisi latar belakang para pegawai yang mayoritas D3 yaitu sebesar 57,89%, menunjukkan bahwa kompetensi pegawai tidak diukur dari latar belakang pendidikan yang ditempuh. Pegawai bidang keuangan perlu diberikan pelatihan seperti diklat dan sosialisasi Perubahan Peraturan tentang Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan, penguasaan dan pengembangan keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya pada bidang keuangan. Etika dan kode etik pegawai sebagai seorang akuntan pun masih perlu ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dimas Pratama Putera (2018) yang menyatakan bahwa kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan, hal ini disebabkan oleh kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum memadai yang dimana belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai t sebesar 3,794 nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,960) dan p-value sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti sesuai dengan hipotesis kedua. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi di satuan kerja lingkup KPPN Yogyakarta telah dimanfaatkan secara tepat dan maksimal. Berdasarkan jawaban responden proses pengelolaan keuangan satuan kerja telah dilakukan secara komputerisasi tidak lagi secara manual. Komputer yang tersedia pun telah cukup dan terhubung dengan jaringan internet,

sehingga pengiriman informasi dan komunikasi antar pegawai dapat dilakukan secara maksimal. Pemeliharaan risiko keamanan pun telah dilakukan secara berkala.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengefektifkan, mengefisienkan kinerja pegawai, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan karena sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses menghasilkan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrianita Hadis et al, 2022 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai t sebesar 1,189 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960) dan p -value sebesar 0,235 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki hubungan yang positif, namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis ketiga, maka hipotesis ketiga ditolak. Dilihat dari jawaban responden mayoritas satuan kerja lingkup KPPN Yogyakarta telah menerapkan SAP. Namun beberapa responden menjawab netral, hal ini diasumsikan karena sikap kehati-hatian responden dalam menjawab dan ada kekhawatiran ketika menjawab di luar ekspektasi yang seharusnya, kemungkinan lainnya yaitu responden bukan pegawai yang mengelola laporan keuangan secara langsung, sehingga ada keraguan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Adanya jawaban netral tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa satuan kerja belum secara maksimal menerapkan SAP dalam pelaksanaan pelaporan.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap seluruh staff pada instansi terutama bagian pengelola keuangan, untuk menghindari ketidaktahuan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan di pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Magelang belum ditetapkan secara maksimal sehingga tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

d. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan variabel pengendalian internal menunjukkan nilai t sebesar 4,727 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960) dan p -value sebesar 0,000 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti sesuai dengan hipotesis keempat. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada satuan kerja lingkup wilayah KPPN Yogyakarta telah berjalan secara efektif. *Standart Operasional Prosedure* (SOP) yang ditetapkan dan manajemen risiko telah diselenggarakan dengan baik. Pimpinan telah melakukan pemantauan dengan selalu mereviu dan mengevaluasi informasi dan melakukan perbaikan sehingga pimpinan dapat mengurangi risiko pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Wayan Tiya Lestari

dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna (2020) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka dapat meminimalisir resiko kecurangan yang ada, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik juga.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis data, pengujian, dan pembahasan yang pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang positif, namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kompetensi sumber daya tidak berpengaruh secara langsung terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara tepat dan maksimal mempengaruhi meningkatnya kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan, mempercepat, dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan akuntansi, karena sudah menggunakan sistem komputerisasi.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki hubungan positif, namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP yang dilakukan satuan kerja tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan.
4. Pengendalian internal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada satuan kerja lingkup wilayah KPPN Yogyakarta telah berjalan secara efektif dan efisien. Pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja.

F. REFERENSI

- Abidin, M. K., Afifudin, dan Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 07(10), 130–141.
- ACFE. 2018. *Global Fraud Study: Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. Asia-Pacific Edition*
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., dan Muslih, M. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota). *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 15(2), 201–210.
- Amararenggana Dharmesti dan Ali Djamhuri. (2018). Peran Teknologi Informasi Dalam Mengantisipasi Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada PT XYZ Tbk). Universitas Brawijaya
- Amijaya, H. T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan *Good Government Governance* Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Computech & Bisnis*, 13(2), 70–80.
- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JURNAL ECONOMINA*, 2(7), 1719–1729. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.668>

- Bukit, Benjamin et.al.2017. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta: Zahir Publishing
- COSO.*Internal Control – Integrated Framework* (2013) An IAASB Overview September 2016. <https://www.coso.org/guidance-on-ic>
- Erawati, T., dan Abdulhadi, M. F. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Ghozali, I. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I (2016) Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Hair, et al, 2014, Multivariate Data Analysis, New International Edition., New Jersey : Pearson
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan 2012. Jakarta.
- Khoirina Kencana Ningrum. 2018. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Kuntadi, C., Juniarty Erika Magdalena Saragi, & Syasi Ikhlami Syafira. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5.995>
- Muda, Iskandar, Deni Yuwilia Wardani, Erlina, Azhar Maksu, Ade Fatma Lubis, Rina Bukit, and Erwin Abubakar. 2017. “The Influence of Human Resources Competency and the Use of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Report with Regional Accounting System as an Intervening.” *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 95 (20): 5552–61.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- RYP Setiadiputra (2017). Urgensi Program Pengembangan Kompetensi Sdm Secara Berkesinambungan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 5 (1), 16-22.

- Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, U
- Tertia Ulma Rahma.2019. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasional, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)”.Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 2–24.
- Yohanes Suhardjo. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang)”. *ajalah Ilmiah Solusi* Vol. 17, No. 4. Universitas Semarang